Kabar Dari Garis Depan



29/5/2006 | Pemerintah dan Bank Indonesia sepakat untuk membayar 50persen utang ke Dana Moneter Internasional atau IMF senilai 7,8 miliar dollar AS pada tahun 2006. Keseluruhan utang ke IMF ditargetkan selesai dalam waktu dua tahun dan hal ini dinilai tidak akan mengganggu cadangan devisa.

30 / 5 / 2006 | **Kaltim** | Mogok 3000 buruh PT Kaltim Prima Coal berakhir. Tuntutan buruh perusahaan batubara dikutai timur itu yakni kompensasi penjualan saham perusahaan oleh PT Bumi Resources Tbk kepada PT Borneo Lumbung Energi, dinyatakan akan di penuhi.

30 / 5 / 2006 | **Kotabaru** | Sekitar 500 dari 1.500 nelayan tradisional yang tergabung dalam organisasi Ikatan Neayan Saijan kotabaru, Kalimantan Selatan, berunjuk rasa ke DPRD Kota baru. Aksi ini mereka lakukan karena sebagian dari nelayan itu tidak bisa melaut akibat minyaktanah langka . Harga minyak tanah di tingkat pengecer mencapai Rp. 4000 per liter atau hampir duakali lipat harga eceranb tertinggi yang Rp. 2.400 per liter . Para nelayan menuntut anggota DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru turun tangan mengatasi keadaan mereka

30 / 5 / 2006 | **Nasional** | PT Pertamina kembali menaikkan harga jual bahan bakar minyak nonsubsidi untuk konsumen indusrei per 1 Juni 2006. kenaikan harga tersebut bervariasi antara 2.3 persen sapai 12.9 persen. Kenaikan itu lebih tinggi dari bulan lalu yang berkisar antara 2,78 persen sampai 5,19 persen/

31 /05 /2006 | **Flores** | Para Mosalaki atau tetua adat dari Desa Saga, Kecamatan Detusoko, dan Mosalaki Desa Sukoria, Kecamatan Ndona Timur ,Kabupaten Ende, Flores akhirnya sepakat mendukung kelanjutan pengeboran sumur eksplorasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Mutubasa di Desa Sokoria. Pasalnya desa-desa tersebut sukar di jangkau jaringan listrik PLN karena faktor topografi, dan di harapkan para penduduknya bukan lagi sebagai penonton selama proyek dan sesudah produksi ke depan.

JUNI

16/06/ 2006 | **Bandung** | 200 sekitar 200 orang buruh dari SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Bandung dan Cimahi berkumpul di Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengikuti sidang pertama antara 13 perusahaan yang menggugat 4 organisasi buruh sebagai provokator memaksa karyawan melakukan mogok kerja pada saat aksi buruh marak menentang revisi UU ketenagakerjaan beberapa waktu lalu. 13 Perusahaan itu menuntut SPSI mengganti kerugian yang dialami para pemilik pabrik-pabrik itu ganti rugi 56,66 milyar akibat pemogokan massal yang konon menurut mereka diakibatkan oleh pekerja dari SPSI yang melakukan 'gedor pabrik' memaksa para buruh lain ikut bergabung.

AGUSTUS

16/08/06 | **Jakarta** | Sekitar 200 orang demonstran dari FSPI, SBJ, PBHI, FPPI dan KAU menuntut Pemerintah dan DPR untuk memutuskan hubungan dengan Bank Dunia dan IMF. Menurut mereka pemerintahan saat ini telah tercengkram oleh jaringan Mafia Berkeley yang merupakan perpanjangan tangan Bank Dunia dan IMF. Sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Hal ini bisa dilihat dari potret pembangunan selama lebih dari 30 tahun ternyata sebagian besar rakyat Indonesia masih dalam kondisi sosial dan ekonomi memprihatinkan. Jumlah penduduk yang hidup dibawah garis garis kemiskinan mencapai 38,4 juta jiwa. Penduduk Indonesia yang memiliki rumah hanya 32,3 persen. Angka pengangguran meningkat dari tahun 1994 berjumlah 3,73 juta jiwa menjadi 9,53 juta jiwa pada tahun 2004. Demonstrasi ini digelar di bawah jembatan Semanggi II bersamaan dengan pidato kenegaraan SBY di depan sidang paripurna DPR RI. Mereka hendak menggelar aksinya di depan kantor DPR RI, tetapi batal karena dihalangi oleh polisi.

SEPTEMBER

02/09/06 | **Sukoharjo** | Sejumlah petani lokal tanpa organisasi apapun melakukan demonstrasi menentang impor beras. Aksi berlangsung damai.

02/09/06 | **Jakarta** | Sejumlah organisasi menggelar pertunjukan kesenian di bundaran HI untuk memprotes pertemuan Bank Dunia dan IMF di Singapura 19-20 September 06. Deputi Kajian kebijakan dan Kampanye FSPI, Achmad Yakub, dalam orasinya megatakan posisi utang pemerintah Indonesia dari World Bank dan IMF adalah US$ 151 milyar, atau sekitar 1.359 trilyun rupiah. Jumlah pembayaran utang tersebut jauh lebih besar dari yang dianggarkan untuk pelayanan sosial masyarakat, atau 6 kali lebih besar dari anggaran kesehatan, hampir 2 kali anggaran pendidikan, 11 kali lebih besar dari anggaran perumahan dan fasilitas umum, serta 33 kali lebih besar dari anggaran jaminan sosial.

05/09/06 | **Jakarta** | Demonstrasi yang artistik digelar di depan Kedubes Jepang. Para pemrotes membawa dua nisan yang masing-masing bertuliskan IMF dan Bank Dunia. Mereka juga melakukan happening art, membawa spanduk bertuliskan "IMF dan Bank Dunia pelaku kejahatan manusia", berteriak-teriak, "Usir IMF sekarang juga!" serta menggenggam padi yang berarti memprotes impor beras yang dianggap membunuh petani lokal. Aksi berlangsung damai.

05/09/06 | **Bengkulu** | Serikat Tani Bengkulu menyatakan menolak keputusan impor beras.

07/09/06 | **Jakarta** | FSPI mendatangi kantor Bulog untuk memprotes keputusan impor beras. Mereka membakar beberapa karung gabah dan menebarkannya di depan pintu masuk gedung.

07/09/06 | **Purwokerto** | Puluhan mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah berdemonstrasi menolak impor beras, aksi ini diikuti juga oleh beberapa pedagang beras dari pasar-pasar tradisional.

08/09/06 | **Padang** | Sejumlah petani dari Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) mendatangi DPRD Sumatera Barat menolak impor beras. Mereka mengancam akan menghadang beras impor yang masuk melalui pelabuhan Teluk Bayur apabila terpaksa.

09/09/06 | **Karanganyar** | Sejumlah petani tanpa organisasi apapun, melakukan protes terhadap impor beras, di depan gedung pemerintahan setempat. Aksi berlangsung damai.

09/09/06 | **Kudus** | Para petani dari Forum Petani Pengguna Air melakukan protes terhadap impor beras. Aksi berlangsung damai setelah beberapa petani diijinkan menyampaikan pendapatnya di depan publik.

10/09/06 | **Jakarta** | Sekitar 100 orang aktifis dari PBHI, Gerak Lawan, FSPI, KAU, FPPI dan Walhi, menyatakan diri akan berangkat ke Singapura saat diselenggarakannya sidang Bank Dunia dan IMF untuk melancarkan demonstrasi menuntut pembubaran kedua lembaga tersebut.

12/09/06 | **Riau** | Kapolda Riau mengancam akan membubarkan acara International People Forum (IPF) yang akan dihadiri oleh 120 organisasi dari seluruh dunia. Acara tersebut merupakan protes terhadap pertemuan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Kapolda mengatakan bahwa ia akan membubarkan kegiatan tersebut karena para pengusaha di Batam merasa resah akan adanya kegiatan tersebut. Namun sadar tidak adanya landasan hukum yang kuat, para aktifis tidak mempedulikan ancaman tersebut dan tetap melangsungkan acara seperti yang direncanakan.

18/09/06 | **Jakarta** | Para petani dari FSPI di Cirebon, Kuningan, Ciamis, Bogor, Karawang dan Banten membanjiri gedung DPR dan kantor Bulog. Mereka menagih janji SBY untuk melakukan revitalisasi pertanian dan membangun sistem pertanian yang kuat. Menurut FSPI impor beras hanya menguntungkan empat pihak yaitu cukong beras, Bulog, Menteri Keuangan dan Bank Dunia/IMF; tetapi sama sekali tidak memperhatikan kepentingan para petani itu sendiri. Mereka mengancam bahwa apabila terpaksa, mereka akan memblokir beras impor yang akan masuk melalui Aceh, Medan dan berbagai tempat lainnya.

19/09/06 | **Karawang** | Sejumlah warga lokal melakukan demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Negeri. Mereka menuntut agar pemerintah membatalkan impor beras.

20/09/06 | **Bandung** | Mahasiswa dari BEM se-Bandung raya berdemonstrasi di depan gedung DPRD. Mereka menolak pemberlakuan impor beras.

22/09/06 | **Jakarta** | Merasa suara mereka tak digubris, para anggota PPNSI melakukan protes terhadap impor beras di depan Departemen Perdagangan (Depdag) melempari gedung dengan kotoran kerbau. Polisi mulai melakukan represinya dan menangkapi para demonstran. Setelah melalui perdebatan yang sengit, para demonstran mengalihkan aksinya ke Polres Jakarta Pusat untuk menuntut pembebasan rekan-rekan mereka yang ditangkap.

OKTOBER

02/10/06 | **Bandung** | Kembali mahasiswa dari BEM se-Bandung raya melakukan demonstrasi menolak impor beras di gedung DPRD. Mereka juga berhasil memaksa melakukan siaran di RRI untuk menyuarakan soal isu tersebut sekitar 15 menit.

03/10/06 | **Pematang Siantar** | Ratusan warga lokal berdemonstrasi ke kantor DPRD memprotes keputusan impor beras.

07/10/06 | **Tanak Awu** | Sekitar 50 orang PAM Swakarsa bersenjata tajam beserta para anggota Pemda setempat, mendatangi para petani anggota Serikat Petani Nusa Tenggara Barat (SERTA-NTB) saat sebagian besar dari mereka sedang bercocok tanam. Mereka memaksa para petani untuk memberikan tanahnya pada mereka untuk dijadikan lahan proyek pembangunan bandara internasional. Karena para petani menolak menyerahkan lahan tempat tinggal dan bercocok tanam mereka, bentrokan terjadi sehingga beberapa petani yang tidak mempersiapkan diri terluka beserta rusaknya tumbuh-tumbuhan yang mereka tanam. Beberapa hari sebelumnya, seorang petani diambil paksa oleh sekelompok preman dan digiring ke kantor polisi untuk diinterogasi beberapa jam karena ia menolak memberikan lahannya bagi proyek bandara tersebut.

COMMUNITY CAMPAIGN AGAINST NEOLIBERALISM

"Jurnal Apokalips" diterbitkan berkala sebagai bagian dari agenda Kampanye Komunitas Bandung Melawan Neoliberalisme. Kampanye ini terlaksana atas inisiatif dari komunitas-komunitas independen di Bandung sebagai ikhtiar melawan gelombang imperialisme yang semakin hari semakin nyata dan terasa dampaknya. Selain menerbitkan media kami juga merilis dan mendistribusikan teks-teks / pamflet lain yang berhubungan dengan neo-liberalisme dan pengorganisiran komunitas dengan format sesederhana mungkin dan semurah mungkin sehingga dapat didistribusikan dengan efesien di Bandung. Selain itu, kami pula membuka ruang-ruang diskusi, sharing wacana dan juga kampanye pemutaran film keliling di komunitas-komunitas Bandung. Untuk itu kami menaruh harapan besar thd keterlibatan kawan-kawan dalam aktivitas kampanye yang kami lakukan. Bantuan dana, tenaga atau pikiran sekecil apapun merupakan kontribusi yang sangat berharga dalam hal ini. Kontak kami lewat email tim "Jurnal Apokalips" di samping.

TIM REDAKSI :
Rikki Rikardo, Loli Cupa Cup, Aji Bragi,
Bambang Sutedjo, XMunirX, Mansour FuckYou
JURNAL APOKALIPS
PO Box 1419, Bandung 40014
tim.apokalips@gmail.com

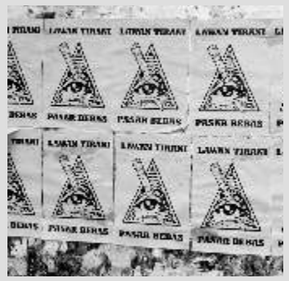
Kontributor silakan menghubungi kami. Tak ada imbalan bagi kontributor sejak jurnal ini disusun atas nama pendistribusian informasi. Seluruh isi jurnal ini tidak memiliki hak cipta. Dan atas nama pendistribusian informasi, siapapun dapat mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi jurnal ini tanpa perlu meminta ijin dari kami.

NOMOR 3 / NOVEMBER 2006

Jurnal Apokalips

NEWSLETTER PERIODIKAL 2 BULANAN | GRATIS SEPERTI JATAH PREMAN

EDITORIAL



Di era otonomi daerah yang terus gencar dikumandangkan pemerintah, sesungguhnya kita tetap tak memiliki otonomi untuk menentukan nasib kita sendiri. Contohnya? Lihat para petani di Tanak Awu yang sama sekali tak digubris saat mereka mengajukan keberatan mereka atas penggusuran lahan pertanian mereka untuk dibangun bandara. Untuk kepentingan bangsa, kata pemerintah. Ah, ternyata para petani tersebut bukan bagian bangsa ini ya?

Pemotongan subsidi bagi pupuk menyulitkan mereka bercocok tanam, pemotongan subsidi BBM makin menguras pengeluaran bagi pendistribusian hasil kerja mereka. Beras jadi mahal. Sebagai konsumen kita gelisah. Seakan peduli, pemerintah berkata bahwa kita terpaksa mengimpor beras! Selain menyediakan beras dengan harga murah, kita juga perlu mencukupi persediaan pangan akibat lahan persawahan yang kian menipis, kata pemerintah. Kita soraki pemerintah, kita kutuk petani! Toh menurut yang tersirat dari pemerintah, mereka tak dianggap sebagai bagian dari bangsa ini, kan?

Eh, tapi sebentar. Bukan salah mereka beras jadi mahal, mereka kan harus bertahan hidup juga. Ah, kini kita lagi-lagi terpaksa dikembalikan pada pertanyaan mendasar: bagaimana kita bisa bertahan hidup di dunia yang penuh tragedi ini. Ada usulan cara bertahan hidup tanpa harus menjilat pantat pemerintah dan kehilangan otonomi? Atau mungkin kita belajar dari apa yang dijalani oleh kawan-kawan mantan pekerja PT. D.I. selama ini.

HARGA BERAS DAN PASAR BEBAS

Kasus 1: Pembukaan PasarPembukaan Keran Impor

Menurut para pengagum pasar bebas, kemakmuran seluruh publik akan terjadi apabila pasar dibebaskan dari seluruh tekanan, sehingga para pelaku pasar akan semakin kompetitif terhadap satu sama lain, yang mana pada akhirnya diharapkan kemakmuran yang didapat oleh para pelaku pasar akan menetes ke bawah (sesuatu yang dalam bahasa ekonomi dikenal sebagai trickle-drop effect). Kompetisi hanya akan sempurna apabila pasar dibuka seluas-luasnya tanpa ada batasan dan regulasi (termasuk batas negara dan aturan pemerintah yang menghambat terjadinya proses jual-beli tingkat internasional). Setiap produk yang diperjual-belikan akan diberi kesempatan untuk bersaing secara bebas di pasaran.

Akhir tahun 2005 lalu di Indonesia Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengeluarkan ijin impor beras sebesar 70.500 ton kepada Perum Bulog. Akhir tahun itu pula WTO (World Trade Organization) melalui pertemuan tingkat menterinya di Hong Kong, mewajibkan pada semua negara anggotanya agar membuka pintu bagi masuknya impor beras —termasuk apabila sebuah negara sesungguhnya telah mampu melakukan swasembada pangan— sebanyak minimal 70.000 ton per tahun. Tujuannya adalah penciptaan pasar bebas yang sempurna, yang mana dalam kasus ini dibuka persaingan bebas antara beras impor dan beras lokal. Semenjak itu pula impor beras mengalir ke Indonesia. 22 Oktober 2005 lalu, sebelum WTO mencanangkan kebijakannya, Indonesia telah secara resmi mengimpor beras sebanyak 68.900 ton.

Kasus 2: Persaingan BebasPenghapusan Subsidi

Di sisi lain, salah satu syarat agar terjadi pasar bebas yang sempurna tersebut adalah dengan dihapuskannya subsidi di bidang apapun, termasuk sektor layanan publik, agar kompetisi yang terjadi dapat seimbang. Dengan demikian, demi terciptanya pasar bebas, seluruh subsidi harus dihapuskan terutama pada sektor-sektor yang dinilai kurang atau tidak memberikan keuntungan finansial. Tentu saja hal ini berarti sektor layanan publik.

Semenjak Indonesia secara resmi menjadi anggota WTO mulailah kebijakan pasar bebas diberlakukan, antara lain dengan memotong seluruh subsidi bagi sektor publik seperti BBM (termasuk listrik, pendidikan, komunikasi, medis, dsb.) Hal ini akan terus berlanjut hingga subsidi yang diberikan oleh pemerintah pada sektor-sektor publik akan benar-benar berada di titik nol rupiah.

Kasus 3: Kucuran Pembangunan Infrastruktur - Kucuran Hutang

Pasar bebas membutuhkan posisi di mana para pelaku pasarnya berada dalam posisi seimbang, atau setidaknya diberi kesempatan untuk menjadi seimbang. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan hutang untuk pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung pengembangan potensi pasar.

Semenjak berkuasanya Suharto, Indonesia mulai menggantungkan diri pada dana hutang IMF untuk proses pembangunan infrastrukturnya. Sebagai prasyarat agar hutang dapat dikucurkan adalah bahwa Indonesia harus terlibat dalam sistem ekonomi internasional: pasar bebas. Sementara lilitan hutang semakin tak terbayarkan, Indonesia tetap bergantung pada hutang baru demi pelunasan hutang lamanya. Proses pelunasan hutang terhadap IMF yang direncanakan oleh SBY-JK akan lunas pada tahun 2007 mendatang juga didapat dari proposal hutang baru pada ADB (Asian Development Bank) sebuah badan moneter yang tak berbeda dengan IMF selain hanya dalam soalan cakupan regionalnya saja. Masalahnya, ADB juga memberikan prasyarat yang sama dengan yang diajukan oleh IMF: integrasi Indonesia pada pasar bebas.

Berbagai Masalah yang Ditimbulkan oleh Skenario Besar Pasar Bebas

Akibat dari pemotongan subsidi bagi sektor layanan publik adalah menanjaknya angka inflasi (yang mana yang terjadi sesungguhnya bukanlah harga produk yang semakin mahal, melainkan akibat turunnya nilai mata uang, daya beli uang). Sejumlah uang yang di tahun sebelumnya mampu menopang hidup satu keluarga beranggotakan 4 orang, kini hanya mampu untuk menghidupi 1 orang saja. Berbanding dengan naiknya inflasi, naik pula angka kemiskinan (yang juga berdampak luas seperti naiknya angka kriminalitas, bunuh diri dan berbagai kekacauan sosial lain). Ini adalah tantangan baru bagi pemerintahan SBY-JK. Di satu sisi pemerintah harus mampu meningkatkan taraf hidup rakyatnya, sementara di sisi lain mereka juga harus patuh pada keputusan sistem ekonomi internasional di mana Indonesia terlibat di dalamnya.

Dalam pernyataannya di hadapan publik sehubungan dengan impor beras ini, SBY-JK mengatakan bahwa pembukaan keran impor beras adalah demi penekanan laju inflasi (dan menurunkan angka kekacauan sosial yang menyertainya) dengan cara menghadirkan beras dengan harga yang lebih terjangkau oleh publik. Mereka menyalahkan inflasi yang timbul tapi tidak menyinggung sama sekali alasan sesungguhnya bahwa ini adalah akibat tekanan sistem pasar bebas. Impor beras dikampanyekan sebagai sebuah solusi atas masalah sosial yang terjadi. Masalah sosial yang mereka timbulkan sendiri.

Masalahnya, apa yang dilakukan oleh SBY-JK tersebut justru meletakkan kesalahan pada para petani lokal, yang seakan-akan dianggap bersalah karena telah memberikan harga beras yang tak terjangkau oleh publik. Bukannya melihat bahwa petani terpaksa menaikkan harga beras akibat semakin tak terjangkaunya seluruh produk di pasaran akibat dipangkasnya subsidi publik, atau bukannya memperbaiki distribusi bahan pangan lokal yang selama ini selalu dikuasai bukan oleh para petani yang melakukan seluruh kerja bercocok tanam. Sementara di sisi lain, para petani lokal dengan berasnya dipaksa bersaing di pasaran dengan beras impor yang harganya lebih murah dan akibat kemajuan teknologi juga lebih baik mutunya. Kini petani mendapat dua pukulan telak dengan diberlakukannya kebijakan-kebijakan pasar bebas tersebut: pertama adalah kemampuan mereka yang semakin menurun dalam mengkonsumsi produk-produk dasar untuk kebutuhan hidup mereka; kedua adalah menurunnya tingkat penjualan produk mereka yang kalah bersaing di pasaran.

Kekeringan atas kemarau yang panjang (akibat pemanasan global yang dihasilkan oleh proses industrialisasi di seluruh pelosok dunia; industrialisasi adalah sebuah program pembangunan infrastruktur yang diusulkan dalam sistem pasar bebas) menghancurkan berbagai lokasi pesawahan nasional. Hal ini juga dilihat oleh pemerintah sebagai sebuah peluang untuk menggolkan isu pentingnya impor beras diberlakukan di Indonesia. Di sisi lain seperti yang kini terjadi di Lombok, pembangunan bandara (sebagai salah satu tuntutan pembangunan infrastruktur) juga akan menghabisi sekian besar jumlah lahan pesawahan yang masih layak tanam serta subur di tengah musim kemarau berkepanjangan ini. Berkurangnya area pesawahan adalah salah satu penyebab berkurangnya persediaan bahan pangan, terutama beras, di Indonesia. Dan hal ini juga dapat dijadikan alasan agar terbukanya keran impor. Maka kini petani mendapatkan pukulan ketiga dan mungkin penghabisannya: menghilangnya lahan-lahan pertanian di mana sebelumnya mereka menggantungkan hidupnya.

Jadi kini, terlihat jelas, di mana skenario utama pasar bebas ini dimainkan di tingkat nasional Indonesia dalam konteks impor beras. Bukan kemarau, bukan kurangnya persediaan beras nasional, bukan ulah petani lokal, bukan sangat minimnya area pesawahan, yang telah membuat beras menjadi sebuah produk yang nyaris tak terjangkau di pasaran sehingga dibutuhkan pemberlakuan impor beras; ini adalah skenario besar pasar bebas. Di mana dalam prosesnya hidup manusia tak lagi dihargai atas nama kesempurnaan pasar. Pasar bebas adalah kebebasan bagi pasar, bukan manusia.

Wawancara Dengan Arif

DARI SERIKAT PEKERJA FORUM KOMUNIKASI KARYAWAN PT. DI (SP-FKK PTDI)

Proses pengadilan yang berbelit, intervensi dari beberapa pihak dan ancaman-ancaman lainnya tidak menyurutkan langkah para mantan pekerja PT DI untuk terus memperjuangkan haknya. Dari momen awal saat mengalami pemecatan sepihak 4 tahun yang lalu hingga akhirnya keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan mereka. Dengan perspektif melampaui garis-garis batas ideologi mereka memberikan contoh bagaimana seharusnya sebuah komunitas; solid, konsisten, militansi yang tinggi, intensitas perjuangan yang tak putus, sekaligus tetap merendah diri dan memiliki solidaritas tanpa batas, baik antar anggotanya maupun dengan serikat-serikat pekerja dan komunitas yang lainnya yang berjuang. Tak pandang bulu. Kalian dizalimi, kalian berniat melawan, mereka akan membantu semampu mereka.

Fenomena kawan-kawan dari PT DI ini lah, terus terang, bukan saja membawa angin segar bagi tradisi perlawanan masyarakat sipil lokal yang, sama-sama kita ketahui, mengalami pembusukan dan dekadensi pasca kejatuhan Suharto. Kapan kalian terakhir kali melihat aksi ratusan bahkan ribuan orang yang intens bertahun-tahun berada dijalanan, dan selalu ada di setiap aksi, meski bukan 'isu mereka' sekalipun? Dari aksi menuntut hak mereka, berbondong memberikan dukungan untuk kasus SUTET bahkan hingga aksi Palestina sekalipun. Dengan terlibat dibanyak koalisi kerakyatan, kawan-kawan PT DI pun secara langsung/tak langsung mengacak-acak peta aktivisme di Bandung yang mulai menjenuh sekaligus menginspirasi untuk membangun lagi sesuatu yang baru dari situ. Ini semua mereka lakukan tanpa banyak omong retorika dan jargon usang ideologis kekiri-kirian atau kekanan-kanan-an, yang sama sekali tak membantu.

Beberapa hari setelah momen Hari Buruh Internasional, kami mengunjungi mereka di hanggar mereka di daerah Cimahi. Lagi-lagi kami merasa kagum. Mereka membangun sebuah basis ekonomi yang sekaligus menjadi basis pergerakan, dimana pendanaannya berasal dari sebagian pesangon yang telah dibayarkan pemerintah kepada mereka. Berikut ini adalah petikan wawancara kami dengan Arif Minardi (Ketua Umum SPFKK), yang berbicara tentang keadaan PT DI sebelum momen pemecatan yang terjadi di tahun 2003 hingga akhirnya mereka dapat memenangkan putusan kasasi MA di tahun 2006.

Ini cukup dapat membungkam mereka-mereka yang berbicara bahwa alternatif lain dari bentuk masyarakat dekaden hari ini tak memungkinkan. Ocehan yang mendikte kita untuk hidup menghamba pada sistem yang tak pernah adil dan pasar yang menindas. Ini lebih dari sekedar retorika tentang bertahan hidup secara mandiri, ber-individu atau berkelompok. Ini adalah salah satu contoh untuk menghargai hidup yang layak dijalani sepenuh hati.



Tanya : Bagaimana ceritanya tentang hanggar ini?

Arief : Ini dibangun Maret tahun kemarin (2005). Luasnya kira-kira 260 meter persegi. Gak termasuk rumah ya. Pada saat pada saat kita pake tanah ini, bangunan udah ada. Ini sebetulanya rumah gak kepakai, dulu ini kan usaha bahan bangunan, eternit. Lalu kita bersihin saja, mau dibongkar sayang kalau kita bikin kita bisa habis 50-60 jutaan dengan luas yang sama. Daripada ngebangun lagi, kita kan harus irit-irit. Total semua ini kita habis sekitar Rp 160 juta.

JA : Boleh tahu cerita kira-kira tujuan pembuatan atau konsep besarnya?

Arief : Gini, jadi, saya dengan temen-temen anggota kita 3500 orang -- ini kan harus mau berusaha bersama. Memang kita tahu kalau usaha sendiri akan berantakan, banyak susahnyalah. Semuanya gak pengalaman. Saya mikir kalau bergabung kan, pertama, kekuatan modal bisa di galang, kedua, dengan banyaknya pikiran dan pengawasan, bisa jalan. Jadi, gitu aja, kita mau mengamankan uang pesangon. Daripada usaha sendiri-sendiri, kita bersama kan udah tiga tahun demo bersama, kita terusinlah persatuannya. Intinya itu saja. Konsepnya kemudian kita butuh satu tempat untuk memulai, biar ada markasnyalah. Ada tempat untuk mulai berkreasi apa saja: Jadi kalau orang ke sini, ini jadi pusatnya. Bahwa nanti yang lain ngerjain di rumah, koordinasinya di tempat ini. Kenapa di sini? Karena kebetulan ada tanah murah saja, daerah dekat kuburan.

Tanya : Organisasinya pakai nama apa sih tepatnya?

Arief : PT. Dirgantara Indonesia Mandiri. Jadi "D" nya tetep kita bawa terus ditambahin Mandiri saja. Kita pengen mandiri, gak kaya PT. DI, disusui pemerintah terus.

Tanya : PT DI Otonom ya? Apa usaha utamanya?

Arief : Ya. Perkara jalan apa enggak, yang penting kita buat aja ini. Minimal secara psikologis ketika ada tempat jadi semangat. Sayang nih tempat. Dari awal sudah ada konsepnya : uang pesangon kan gak bisa langsung diterima. Soal core bussiness-nya gak ada. Sebetulnya, kita merangsang orang untuk usaha saja. Kompetensinya saya ngebantu, karena kita banyak kenalan jaringan dan coba untuk manfaatin itu. Jadi sebetulnya kalau disebut koordinasi, bisnis intinya pesawat, manufakturnya maintenance. Cuma, kalau untuk sekian ribu orang ggak mungkin kaya gitu, ya udah sebisanya saja, iya toh? Jadi kaya otonomi masing-masing saja, kita di sini jadi semacam tempat konsultasi, untuk pemasaran bareng dan lain-lain, kan lebih murah. Jadi, temen-temen kita buka workshop di Cihanjuang, Kiaracondong, lalu kita pasarin itu. Workshop-nya di masing-masing daerah karena gak muat juga kalau workshop-nya semua di sini. Ya, manufaktur apa saja. Yang di Cihanjuang itu barang-barang presisi (yang kecil-kecil) bisa alumunium, bisa logam atau alat produksi sapu, ada yang buat itu juga, masing-masing coba. Ada juga temen-temen bikin alat elektronik, antene. Bahkan, kalau mau, buat TV pun bisa. Radio broadcast, TV, untuk radius 60 km, itu kemaren di hitung-hitung kurang lebih 350-400 juta, yang sudah bisa on air. Temen-temen yang bergerak di bidang itu sudah siap, gambar-gambarnya sudah ada semua.

Tanya : Ada proses bingung dan coba-coba dulu dong?

Arief : O iya, kita coba apa sajalah. Prinsip saya dalam bisnis, pokoknya anda gerak saja. Al Qur'an kan sudah nyuruh bangun subuh, sholat subuh, setelah sholat subuh berpencarlah kalian. Gimana? Ya berpencaran saja, kan punya otak, keluar dari rumah. Saya cuma inisiatifkan saja. Terus, ya, bingung karena kita gak pernah bisnis. Pokoknya keluar saja dari rumah dulu. Jadi mikir nih. Otak jadi berkembang, keluar rumah, nanya sana nanya sini, pokoknya berkreasi. Bahwa pada saat bergerak, baru ada unsur doa, unsur nasib, ya kalau mau keluar rumah. Ketemu orang pebisnis yang ngumpul-ngumpul, cocok, bisnis. Yang penting gerak, saya sih sederhana gak perlu pake teori yang macem-macem.

Tanya : Oke, soal demo-demo, itu ketika ngumpul ada hepinya juga dong?

Arief: Iya. Kalau ngumpul itu yang namanya susah kan jadi lupa, iya kan? Gak punya uang, di rumah, sendirian, itu stress jadinya. Tapi gak punya uang, kalo kumpul jadi lupa. Minimal yang gak punya rokok akhirnya minta ke sebelahnya, di rumah gak bisa. Toh, tidak seluruhnya dari 3500 anggota ini miskin semua. Kan ada yang waktu dulu saat kerjanya nabung, strata-nya macem-macem, ada yang sarjana, ada yang punya background khusus, ada yang bisa nabung dulunya, ada warisan dan lain-lain.

> "Ketika kita demo,
> yang datang itu,
> dari istilah intelejen,
> dari kanan sampai kiri"

Tanya : Pesangonnya turun sekaligus?

Arief: Enggak. Dari total 200 miliar, kemarin itu perdamaiannya kan 40 milliar tunainya, sisanya dicicil, lantas dibuat usaha bersama. Sebenarnya, kita memberikan kemudahan kepada pemerintah, ide itu dari kita. Nah, dicicil banyak caranya, bisa keuntungan perusahaan disisihkan, kemudian juga bisa buat usaha bersama antara PT. DI dengan mantan karyawan dan difasilitasi oleh pemerintah. Sehingga pekerjaan-pekerjaan dari pemerintah apapun bisa kita kerjakan dengan prinsip bisnis. Kalau ada orang lain yang menawarkan lebih murah orang lain masuk, kalau kita lebih murah maka kita yang masuk, dan saya yakin kemungkinan besar banyak kita yang lebih murahnya. Nah, yang 40 milliar itu dijadikan modal. Tidak dibagikan. Kalau dibagikan paling 2 atau 3 bulan sudah habis. Kita masukkin ke bank. Dengan bunganya kita udah punya kurang lebih 400 jutaan tiap bulan, iya kan? Jadi, bunganya itu saja yang dipakai modal. Kalau bisnis udah jalan dan kita butuh-butuh modal lagi, baru dipakai pokoknya.

Tapi harus sudah jalan dulu bisnis itu. Bisnis baru kan rawan, bunganya saja yang dipakai jadi kan aman. Dari bunga 400 juta itu, taruhlah 50 juta saya pakai untuk beli beras. Yang gak punya uang, khususnya, yang udah habis uangnya ambil beras gratis. Yang punya belilah, jadi subsidi silang. Sambil saling bisnis, begitu nanti sudah punya semua, ya beli semua. Terus dana yang tadi bisa dialihkan ke dana modal kerja juga. Jadi banyak kalau bersama-sama. Kalau ada penghasilan kan bisa disisihkan juga, untuk kesehatan. Intinya ya itu saja, dengan 40 milliar itu.

Tanya : Kira-kira payung seperti apa yang diharapkan dari pemerintah ini?

Arief: Bisa diaturlah, apakah yayasan, jadi pemerintah juga ngawasin uang 40 milliar itu, bukan hanya SP (Serikat Pekerja) saja. Kalo SP saja nanti curiga, wah ini kerjaannya si Arief supaya dia dapet hidup. Makanya, diawasin sama-samalah, pemerintah dan PT. DI. Saya juga ngawasin. Atau kalo pemerintah mau lebih serius lagi, sudah dia yang ngasih manajer bisnisnya atau direktur bisnisnya, buat satu lembaga atau yayasan atau PT. Pembagian sahamnya jelas. Jadi saya awasin uang saya. Tapi itu kan cerita kesepakatan. Sampai saat ini belum ada yang bisa dipegang. Baru cuma tanda tangan. Ya begitulah pemerintah itu dengan rakyatnya sendiri.

Tanya : Jadi, sebetulnya, masih dipingpong terus?

Arief: Iya. Kemarin itu kan aksi buat menanyakan kapan implementasinya. Kemarin ke BUMN diterima oleh Sesmen perwakilan. Saya tidak ikut langsung masuk berunding. Tapi sebelumnya perundingan sudah ada, jadi tinggal nagih saja. Cuma kan itu bolak-balik, mau selesai gak jadi-jadi. Saya khawatir juga saya bisa dicurigain sama orang. Jadi kita bareng-bareng aksi untuk tanya langsung saja sama pejabat. Bukan apa-apa supaya anda juga ngerti permasalahan yang ada. Jadi ini forum langsung. Karena masalahnya sudah jelas, bukan lagi masalah yang ruwet yang butuh argumentasi hukum. Kesepakatannya, status 40 milliar itu harus minta ijin ke departemen keuangan, ke Menteri keuangan. Ya status administrasilah, legalitas, itu yang dijanjikan dan dia sudah buat surat ke menteri keuangan. Ini cerita yang sering terjadi semenjak kita dirumahkan. Cerita tentang cara-cara yang gak bener, yang sudah kelihatanlah dari sejak masa-masa itu. Buat kita, prinsip kita, bahwa kondisi seperti itu tidak bisa dibiarkan, minimal dilawan. Saya yakin perlawanan itu berdampak. Soal hasilnya, itu bukan urusan kita, minimal kejadian ini jangan sampai menimpa orang lain. Juga, minimal mereka juga mikir. Intinya kita ngelawan cara gak bener saat kita dirumahkan (PHK), yang tidak sesuai hukumnya. Itu sebagai pelajaran saja. Bahwa kita tahu cara ngelawan pemerintah.

Tanya : Strategi cara bertahan hidupnya gimana?

Arief: Sebetulnya sederhana. Ketika di-PHK itu kan orang dapat pesangon, ketika dapat pesangon tidak semuanya karena masih ada dana yang tersisa itu. Dari pesangon tahap awal, terus yang tersisa itu, pensiun. Kemudian dari pesangon itu kurang lebih bervariasi dari 10 juta sampai 100 juta, bahkan kalau pejabat ada yang 200 juta, atau golongan tinggi sampai 150 juta. Rata-rata kurang lebih antara 60-70 jutaan. Dengan uang itu bisa beberapa tahun, taruhlah, gak kerja? Sebagian karyawan ada yang bekerja kembali, yang punya kompetensi bisa diterima diluar negeri, di Malaysia, Arab, Timur Tengah, Singapura dan di berbagai Negara, ada yang di Eropa juga Brazil. Itu yang kerja. Kemudian untuk yang gak kerja, ada uang yang untuk usaha dari uang pesangon itu. Nah, dari yang usaha ini ada yang berhasil ada yang gagal. Yang berhasil mungkin jadi manjang, yang gagal itu yang habis. Kemudian ada yang memang gak usaha karena gak mudah, nyari usaha itu kan lama-lama uangnya jadi menipis juga. Tetapi dengan uang segitu kurang lebih untuk 2-3 tahun bisa survive, bertahan hidup. Nah, dari mana kita demo? Ya dari uang-uang itu juga. Yang penting usaha toh, kita demo gak tiap saat kan? Emang tiap hari, seperti yang apel di patung itu (Note: Patung besar di pertigaan jl Nurtanio-Pajajaran, Bandung), tapi untuk yang kerja gak ikut demo tiap hari. Bergantian. Saya ini kan termasuk yang kerja, jadi gak usah (ikut demo). Tapi cari uang. Sementara yang tersisa ini, daripada diam di rumah "pusing" mendingan kita ngumpul bicara bisnis, bicara apapun ngilangin stress. Nah itu survivenya. Kemudian dengan kondisi itu memang kita sering diisukan bahwa kita dibiayain siapalah, gitu. Padahal sebetulnya biaya kita masing-masing.

Tetap itu kan terbatas, ada batas akhir dimana uang itu habis. Makanya demo yang terakhir ini jumlahnya menurun kan? Kalau dulu sampai 5000-6000 orang, ya terakhir ini cuma 2000-3000an. Kenapa? Pertama, ada yang kerja, sebetulnya yang nganggur sih pada survive. Juga, karena dia ada yang subsidi silang tadi. Yang kerja kadang minjemin atau apa kek. Tapi terus kita sepakat membangun hanggar ini. Kita buat urunan resmi, tercatat semuanya dalam notaris resmi. Ini semacam holding-companynya, semacam pusat kegiatan bisnisnya.

Ada yang buka toko, tergantung, kalau gak punya keahlian biasanya berdagang atau kayak yang di Cihanjuang, Kiaracondong, atau ada yang dirumahnya masing-masing punya mesin bubut sendiri. Kita konsentrasi karena seluruh permasalahan urusan kekurangan sisa pesangon, kan sudah jelas hukumnya, sudah ada semua kan? Sehingga, contohnya, ke Jakarta besok tinggal ambil file ini, lalu berangkat. Kalau dulu kan kita buat tulisan dulu, buat argumen dulu.

Yang kedua, kan sudah ada lawyer juga. Jadi kalau dibutuhin ke Jakarta, tinggal berangkat. Yah sambil memperkuat persatuan dan sambil rekreasi, pulang cari uang lagi. Cari uangnya untuk sementara. Misalnya ini ada bandeng presto murah, ambil, jual. Ada beras. Contoh beras, saya tanya siapa yang saudaranya punya penggilingan di kampung, ya udah kirim beras dari kampung sana kan murah. Jadi dari 3000 orang yang punya saudara ini, kayak usaha bandeng presto ini, mereka ternyata juga korban PHK dari Telkom. Kita coba menggalang terus, karena dengan tiga tahun ini persatuan jadi makin erat. Memang ada juga yang gak puas, ya biasa itu mah.

Tanya : Apa yang membuat solid atau kompak?

Arief: Temen-temen semua sama, berusaha sungguh-sungguh, berusaha konsisten, terus terbuka. Gerakan kita murni, ini gerakan buruh tanpa ada embel-embel partai. Saya bekerja dengan pikiran sendiri, musyawarah dengan pengurus, dengan anggota, itu saja. Perjuangan kita menuntut yang sesuai hukum.

Sebelum di PHK mereka ada unsur dendam, banyak pejabat yang kebongkar. Saat pertama SP dibentuk, saya berpikiran sederhana "ini perusahaan BUMN, rata-rata korup" (itu orang sudah pada tahu), kemudian PT. DI selalu membebani Negara. Saya berpikir kalau orang-orang gak korup sebenernya gak bakalan membebani Negara. Potensi itu ada sehingga waktu itu urusan ketenagakerjaan ada masalah pelanggaran-pelanggaran, tetapi semestinya untuk BUMN UMR kan sudah diatas rata-rata atau minimal samalah.

Ada yang lebih penting, perusahaan BUMN itu gak ngawasin perusahaan bobrok, malah di peres sama pejabat. Kekurangan gaji tinggal bilang sama pemerintah terus di-drop uang setelah itu ada yang hilang. Berarti perusahaan ini menguntungkan untuk segelintir individu, buat Negara rugi. Tapi kan Negara tidak merasa. Rakyat walau merasa pun tidak langsung terasa. Misalnya, sekarang Garuda sudah bangkrut, kan gak berani pemerintah membangkrutkan. Saya berpikir pada akhirnya korbannya pasti kita-kita juga, yang langsung korban ya rakyat yang bekerja disitu kan. Akhirnya SP itu jadi berfungsi juga sebagai corporate watch karena kita tahu dari dalamnya.

Tanya : Pengalaman dengan keluarga masing-masing gimana?

Arief: Keluarga jelas kesulitan. Saya akui kesulitan tiap bulan untuk hidup, ya ngutang dari sodara-sodara yang lain, kadang-kadang tiap hari harus ngutang. Hutang hari ini 50 ribu, lumayanlah 2-3 hari. Tiga hari kemudian cari hutang lagi 100 ribu, 100 ribu bisa buat 4 hari, gitu saja. Sebetulnya kalau mikirin itu ya pusing. Mikirin 3000 ribu orang, ini kan orang berharap, kita coba kasih semangat, "sudah gak usah panik dengan PHK, tenang", masa kita gak bisa di luar, kerja, cari bisnis. Tapi kan orang juga jadi berharap. Makanya, kita buat bisnis sama-sama. Akhirnya, mulailah dengan dagang, apa saja. Tapi kan gak bisa langsung menyerap tenaga kerja. Kita kan masalahnya juga sama, karena uang pas-pasan. Jadi saya merasa beban moral. Akhirnya cuma yakin aja, usaha! Kayak bikin hanggar ini. Kemarin kita memulai bisnisnya kan susah. Patungan uang dapat 200 jutaan, sudah bangun sajalah, yang penting kalau sudah ada bangunannya semangat ada kan. Sekarang saya coba mulai yang teknisnya, kalau saya bisnis menurut teorinya yang paling gampang kan dagang, makanan, beras, baru ke elektronik yang mulai invest jangka panjangnya. Tapi temen-temen yang lain juga pada jalan, manufacturing, fiber (yang buat toilet dari fiber), radar. Ini saat mulai nyusun-nyusun bisnis. Karena, begini, bisnis itu gak bisa paruh waktu! Yang kedua, kalau kita bisnis order manufacturing kita jangan pernah cacat atau apapun. Itu saya tidak mau. Resiko kalau kita cacat, karena orang kenal kita sebagai demonstran, cacat sedikit saja ya maka mereka akan bilang pantaslah di-PHK. Orang bisa takut berhubungan dengan kita. Makanya kita harus lebih. Ketika ada order saya gak berani sembarangan karena sedikit cacat saja akan nempel lama.

Tanya : Terus bentuk kolektif organisasinya seperti apa?

Arief: Langsung kita buat PT setelah di-PHK. Baru sekarang kita mulai operasional, mulai serius di buat PT., sudah terdaftar pajak ....Pokoknya daftar saja walaupun gak ada usahanya, nol. Yang menyalurkan bandeng presto gak usah dilaporin, untungnya cuma segini kok. Dan kita juga berhitung soal saham. Walaupun temen-temen sendiri, persyaratan profesionalnya ada. Setiap orang yang naruh, dia terdaftar, tersimpan secara hukum, semua ada.

Tanya : Kabarnya sering juga ikut aksi solidaritas diluar isu PT. DI?

Arief: O iya. Ketika kita demo gak selesai-selesai, orang banyak datang kan, yang datang itu, dari istilah intelejen, dari kanan sampai kiri. Prinsipnya saya harus adil, agama menyuruh kita adil, kecuali orang-orang ini sudah jelas-jelas tersangka atau apa. Saya kan juga gak boleh egois dalam beraktivitas itu, kalau egois kita hanya menjual perut kita sendiri kan? Misalnya, untuk solidaritas buruh, maka kita utamakan yang bener-bener sesama buruh. Selanjutnya, lihat tuntutannya. Kalau tuntutannya rasional, untuk kemajuan bangsa, ya sudah.

Tanya : Ke depan proyeksinya kayak gimana nih mas?

Arief: Konsentrasi ke depan, buat saya sendiri, ya cari nafkah dulu buat keluarga, itu kan kewajiban juga. Itu kalau kewajiban perjuangan, wajib kifayah-lah, dan sudah kita lakukan.

Kabar Dari Garis Depan

BERITA AKSI & REAKSI DI BULAN MEI HINGGA OKTOBER

MEI

2 / 5 / 2006 | Seluruh serikat buruh menegaskan tak akan menghadiri forum tripartit nasional terkait dengan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pertemuan ini dihadiri oleh Konfederesasi Serikat Buruh Indonesia (KSBSI), Serikat Pekerja Indonesia, Dan Partai Buruh. Ketiga konfederasi ini merupakan wadah 86 serikat buruh yang terdaftar resmi di pemerintah. Tanpa ketiga Konfederasi ini, Pertemuan pengusaha, buruh, dan pemerintah ditingkat nasional (forum Tripartit nasional) dipastikan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

05/05/2006 | **Semarang** | Ratusan warga dari 10 desa di kabupaten Semarang melakukan aksi demonstrasi di kantor PLN Proyek Pembangkit Jaringan Jawa Tengah. Mereka menuntut agar ganti rugi dan dana kompensasi pendirian menara SUTET yang melintasi desa mereka segera dibayarkan. Dialog dilakukan tapi tidak menghasilkan kesepakatan apapun sehingga warga marah dan melempari kantor PLN. Polisi lantas dikerahkan untuk menenangkan warga.

06/05/2006 | **Cirebon** | Ratusan pekerja di bawah organisasi Forum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) melakukan demonstrasi menolak revisi UU 13/2003 di kantor DPRD Cirebon.

10/05/2006 | **Tegal** | Ratusan pekerja pabrik pengolahan kayu PT Estetika Pulomas melakukan pemogokan massal. Mereka menuntut agar upah mereka selama 2 bulan segera dibayarkan dan perusahaan menaikkan upah sesuai UMK baru sebesar Rp.300.000,-/bulan.

10/05/2006 | **Bogor** | Sekitar 50 orang pengunjuk rasa yang mengatasnamakan warga Desa Pasir Buncir Mendatangi DPRD Kabupaten Bogor. Para pengunjuk rasa yang didampingi kalangan lembaga swadaya masyarakat itu mendesak DPRD agar melegalkan Penambangan pasir di Pasirbuncir. Hasilnya Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bogor menyetujui agar galian pasir di Desa Pasirbuncir dilegalkan

10/05/2006 | **Indramayu** | Ratusan pelajar SLTP PGRI I dengan dibantu para orang tua dan guru, membangun barikade menutup jalan di depan sekolah mereka untuk menghalangi tim eksekutor. Mereka menolak eksekusi lahan sekolah mereka yang sesungguhnya telah dibeli oleh Yayasan PGRI tapi diklaim oleh pengadilan sebagai milik pribadi 2 orang warga Indramayu.

11 / 5 / 2006 | **Bogor** | Ratusan calon penumpang kereta api listrik atau KRL ke Jakarta mengamuk di stasion Kereta Api Bogor, Selain memecahkan kaca gedung setasiun, mereka juga memecahkan jam gantung tua yang merupakan benda bersejarah peninggalan Belanda di stasiun itu. Dikarenakan keterlambatan kereta dan petugas tidak memberitahuka alasannya.

12/05/2006 | **Donggala** | Sekitar 300 petani desa Lalundu, Sulteng, mendatangi kantor PT Astra Argo Lestari Palu, gedung DPRD dan kantor Gubernur Sulteng, menuntut pemerintah mengembalikan lahan seluas 2798 hektar milik warga yang diambil paksa secara bertahap sejak tahun 1990.

15/05/2006 | **Jakarta** | Sekitar 500 petani yang dikoordinir oleh FSPI (Federasi Serikat Petani Indonesia) datang dari berbagai wilayah di Indonesia melakukan aksi demonstrasi di depan hotel Shangrila tempat dimana FAO mengadakan Konferensi Rakyat Asia-Pasifik. Mereka menuntut agar FAO mengubah konsep ketahanan pangan menjadi kedaulatan pangan, karena konsep dari FAO tersebut yang telah dipraktekkan sejak tahun 1996 hanya terus meminggirkan kehidupan petani di seluruh dunia.

15/05/2006 | **Tangerang** | Ratusan pekerja pabrik furnitur PT AMS melakukan demonstrasi di depan perusahaan dan kantor Dinas Tenaga Kerja menuntut kenaikan kesejahteraan dan kebebasan untuk mendirikan serikat pekerja.

17/05/2006 | **Jakarta** | Para petani kembali melakukan demonstrasi, kali ini dengan partisipan sekitar 10.000 orang petani dan para pendukungnya. Aksi ini diikuti juga oleh beberapa representatif gerakan petani dari Korea Selatan, India, Thailand dan Filipina. Pemerintah menjanjikan akan membahas masalah ini dalam sebuah rapat khusus, tapi hari sebelumnya pemerintah jugalah yang memutuskan untuk menaikkan harga pupuk yang dibutuhkan para petani.

17/05/2006 | **Bekasi**| Jalan tol Cikunir-Hankam diblokir ratusan warga Jatimekar, Bekasi, karena hingga kini tidak juga kunjung menerima uang ganti rugi tanah mereka yang diambil untuk pembangunan jalan tol. Dinas Pekerjaan Umum bersikukuh hanya akan membayar ganti rugi untuk 3555 meter persegi sementara tanah warga yang diambil alih mencapai satu hektar.

17/05/2006 | **Mamuju** | Puluhan petani menuntut pengembalian lahan seluas 2000 hekatar yang direbut oleh pemerintah untuk pembangunan Bandara Hasanuddin Makassar. Mereka dihadang ratusan aparat kepolisian dalam perjalanan menuju kantor Bupati Mamuju.

18/05/2006 | **Malang** | Dini hari, ratusan Polisi Anti Huru-Hara (PHH) bersenjata lengkap dikerahkan untuk membubarkan pemogokan dan pendudukan pabrik karoseri Adiputro yang telah berlangsung sebulan. Seorang pekerja ditangkap karena membawa senjata tajam.

26 /5 /2006 | **Kutai** | 3.000 buruh PT Kaltim Prima Coal melakukan mogok kerja dan mengakibatkan aktivitas perusahaan tambang batubara di kutai timur lumpuh total. Mogok kerja tersebut berkaitan dengan tuntutan buruh atas kompensasi penjualan saham itu , dari PT. Bumi Resources Tbk kepada PT Borneo Lumbung Energi Kaltim Prima Coal disebut-sebut sebagai tambang batu bara paling besar cadangannya di dunia dan merupakan tambang terbuka.

29 /5 /2006 | Ribuan Buruh Pabrik anggota Serikat Pekerja Nasional merelakan Upahnya di potong sebesar satu persen untuk para korban gempa di Yogytakarta dan sekitarnya. Hal yang sama dilakukan oleh sekitar 1.500 pekerja di PT Sunrise Bumi Textiles secara sepontan memberikan seluruh upahnya selama satu hari kerja untuk disumbang bagi korban bencana.

29 /5 /2006 | Ribuan hutan di Sulawesi Tengah dirambah setiap tahunnya dengan alasan untuk proyek transmigrasi, hasil dari investigasi Yayasan Merah Putih Dan Wahana Lingkunagn Hidup (Walhi) Hampir semua proyek trasmigrasi di Sulteng dalam lima tahun terakhir merupakan rekayasa kontraktor dan pejabat berwenang. Tujuan penebangan ini untuk mengambil kayu hasil tebangan.